

RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI



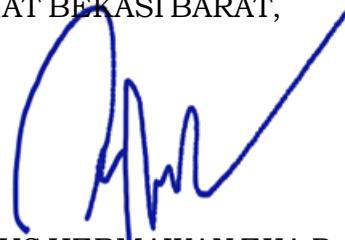
**RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI BARAT
KOTA BEKASI - TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 ini merupakan Perjanjian Kinerja Antara Kepala PD dalam Hal ini Camat Bekasi Barat dengan Walikota dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Kota Bekasi serta menerangkan laporan Capaian keuangan dan capaian target kegiatan yang menjelaskan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan PD maupun Belanja Langsung urusan program). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Barat tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bekasi Barat Tahun Anggaran 2024.

Semoga laporan ini menjadi bahan masukan dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bekasi Barat ditahun berikutnya.

Bekasi, 2023
CAMAT BEKASI BARAT,



GUTUS HERMAWAN EKA P, S.IP
NIP. 197108171998031010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II	16
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BAB III	43
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	44
3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Barat	48
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	49
4.1 Program dan Kegiatan	49
BAB V PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bekasi Barat dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bekasi Barat sampai dengan Tahun 2023 (tahun berjalan) 15

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024..... 26

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bekasi 42

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 42

Tabel 3.2. Rekapitulasi Program tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019..... 48

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi tahun 2024 berdasarkan Permendagri Noor 90 tahun 2019 dan Rancangan Awal RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah untuk tahun rencana 2024-2026. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan daerah pada umumnya.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur, mengamanatkan secara lugas bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja (Renja) PD, yang merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan PD.

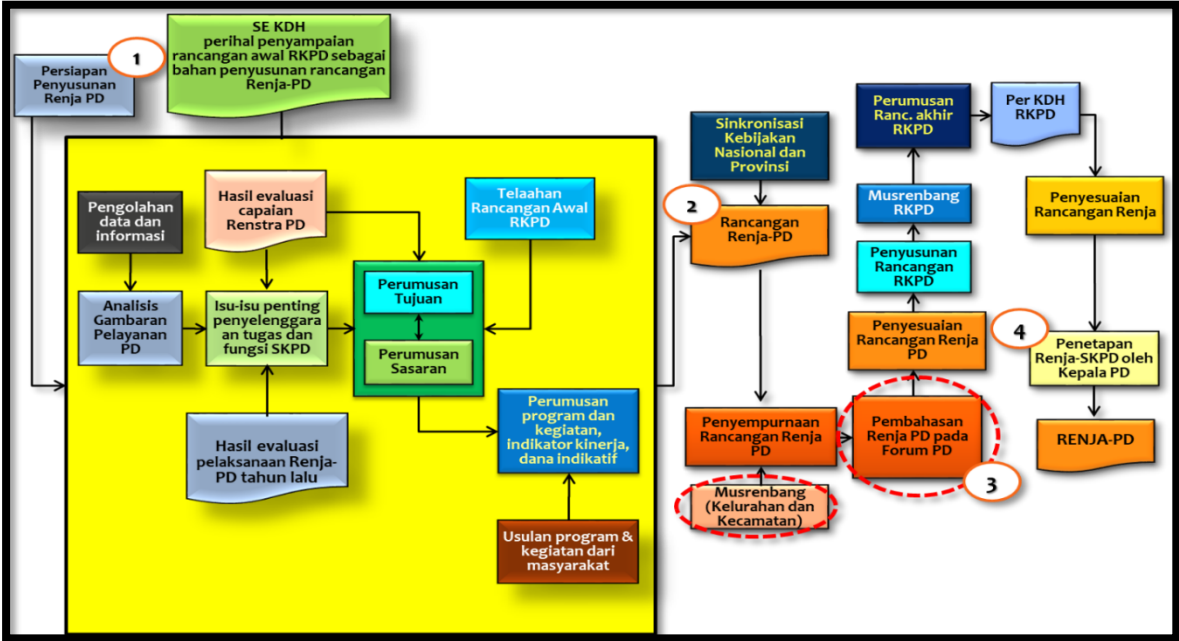
Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sesuai dengan peraturan tersebut.

Dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang maka terbentuklah penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diselaraskan dengan rancangan renja PD.

Penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting

PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.



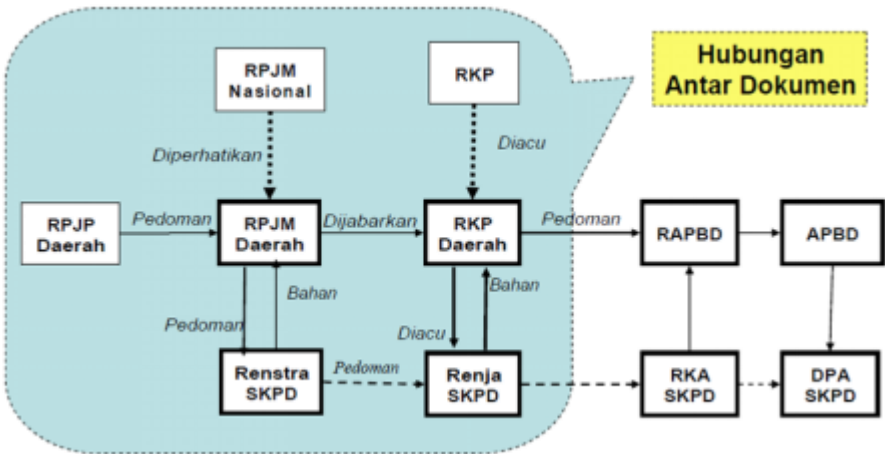
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diolah

Gambar 1.1.
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPd
(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Berdasarkan gambar di atas, penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja, hingga penetapan Renja.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024 dilakukan penelaahan Renstra dan Renja terkait yaitu Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi terkait isu strategis bidang perencanaan pembangunan daerah serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat terkait isu strategis penelitian dan pengembangan, Renja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024 disusun dengan pendekatan kinerja yang akan

program dan kegiatan Kementerian Kementerian/Lembaga dalam mendukung prioritas Presiden. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJM dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).



Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD Rencana serta aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Bekasi.

Penyusunan Renja PD tidak hanya berpedoman pada RKPD tetapi juga berkaitan dengan Renja K/L dan Renja Provinsi. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

- A. Tujuan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 :
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel;
 2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara berkeadilan;
 3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
 4. Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota;
 5. Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman.
- B. Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 :
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel;
 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah;
 3. Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi;
 4. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat untuk sehat;
 5. Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan;
 6. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan Pembangunan responsif Gender;
 7. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota;
 8. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan;
 9. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi;
 10. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat;
 11. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat;
 12. Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana.

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi, penyelenggaraan urusan

pemerintahan pada Kecamatan terdapat dalam Tujuan ke-1 (satu) dan Tujuan ke-5 (lima), yaitu :

- Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel.
- Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.
- Tujuan : Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman.
- Sasaran : Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara No. 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara No. 6402) status mengubah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah dicabut Sebagian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12. Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi tahun 2005-2025 (Lembaran Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 SERI E);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Lembaran Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 SERI D);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi;

26. Peraturan Wali Kota Bekasi No. 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan social yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 14 Seri E);
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11.A Tahun 2021 tentang Kelembagaan Perencanaan dan Penganggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Renja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai landasan operasional penyusunan program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2024;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Bekasi Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat;
4. Menjadi acuan bagi seluruh kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan oleh semua Kepala Seksi Kecamatan dan Para Lurah Sekecamatan Bekasi Barat ;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan;
6. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024; dan
7. Menjadi alat observasi untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) OPD sebagai bahan penyusunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun seperti yang diterapkan di Undang-undang No. 25 Tahun 2004, yaitu : Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program-program dan Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen Stakeholders Kota Bekasi. Penyusunan RencanaKerja Kecamatan-Kecamatan mengacu pada panduan Tata

Cara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum Rancangan penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Bekasi Barat, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Bekasi Barat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Bekasi Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Bekasi Barat, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN LALU

Dalam Bab ini menjelaskan tentang aspek kewilayahan Kecamatan Bekasi Barat, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai target.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bekasi Barat.

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bekasi Barat tahun lalu (tahun n-2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Barat sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dan disertai penjelasan apabila ada temuan-temuan perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Stakeholder yang ada di Kota Bekasi

yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan telaahan terhadap kebijakan nasional landasan hukum serta tujuan dan sasaran Renja OPD.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada bagian ini dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Pada bagian ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang mempedomani Renstra Tahun 2024-2026.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada bagian ini berisikan rumusan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BEKASI BARAT

Pada bagian ini berisikan Tabel rencana program dan kegiatan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Pada Bab Penutup ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BEKASI BARAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bekasi Barat tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Bekasi Barat diperoleh dari capaian kinerja Renja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bekasi Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bekasi Barat

Pada tahun 2024, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi memiliki dua sasaran yang harus diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat; dan (2) Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang kuat.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

KODE KEGIATAN	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D 2023		CATATAN PENTING
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%		100%	-	-	100%	-	-	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	-	-	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	

KODE KEGIATAN	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D 2023		CATATAN PENTING
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	

KODE KEGIATAN	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D 2023		CATATAN PENTING
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	

KODE KEGIATAN	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D 2023		CATATAN PENTING
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	-	-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1. Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	200 Orang	-	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	-	-	
		2. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	9 Unit	-	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	-	-	
		Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Kegiatan	-	3 Kegiatan	-	-	3 Kegiatan	-	-	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-	

KODE KEGIATAN	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D 2023		CATATAN PENTING
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)	
	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Jumlah Laporan Bulanan kader posyandu, PKK dan PKP	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		2. Jumlah Laporan MUB	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		3. Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan, Kemasyarakatan dan Keagamaan	8 Kegiatan	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%	8 Kegiatan	-	-	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi Lomba Kinerja Kelurahan	5 Kegiatan	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	-	-	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Jumlah Laporan Bulanan kader posyandu, PKK dan PKP Kelurahan Bintara	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		2. Jumlah Laporan Bulanan MUB Kelurahan Bintara	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		3. Jumlah Laporan Bulanan Pimpinan dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		Kelurahan Bintara		-		-	-		-	-	

KODE KEGIATAN	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D 2023		CATATAN PENTING
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)	
		Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW Kelurahan Bintara	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Jumlah Laporan Bulanan MUB Kelurahan Bintarajaya	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		2. Jumlah Laporan Bulanan Pimpinan dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah Kelurahan Bintarajaya	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		3. Jumlah Laporan Bulanan Posyandu, PKK Dan PKP Kelurahan Bintarajaya	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		4. Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW Kelurahan Biintarajaya	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Jumlah Laporan Bulanan kader posyandu, PKK dan PKP Kelurahan Kranji	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		2. Jumlah Laporan Bulanan MUB Kelurahan Kranji	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	

KODE KEGIATAN	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D 2023		CATATAN PENTING
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)	
		3. Jumlah Laporan Bulanan Pimpinan dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah Kelurahan Kranji	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		4. Jumlah Laporan Kegiatan Laporan RT RW Kelurahan Kranji	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Jumlah Laporan Bulanan kader posyandu, PKK dan PKP Kelurahan Kotabaru	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		2. Jumlah Laporan Bulanan MUB Kelurahan Kotabaru	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		3. Jumlah Laporan Bulanan Pimpinan dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah Kelurahan Kotabaru	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		4. Jumlah Laporan Kegiatan Laporan RT RW Kelurahan Kotabaru	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	

KODE KEGIATAN	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D 2023		CATATAN PENTING
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Jumlah Laporan Bulanan kader posyandu, PKK dan PKP Kelurahan Jakasampurna	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		2. Jumlah Laporan Bulanan MUB Kelurahan Jakasampurna	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		3. Jumlah Laporan Bulanan Pimpinan dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah Kelurahan Jakasampurna	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		4. Jumlah Laporan Kegiatan Laporan RT RW Kelurahan Jakasampurna	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	-	-	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Kegiatan LPM Kelurahan Bintara	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Kegiatan LPM Kelurahan Bintarajaya	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	

KODE KEGIATAN	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D 2023		CATATAN PENTING
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Kegiatan LPM Kelurahan Kranji	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Kegiatan LPM Kelurahan Kotabaru	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Kegiatan LPM Kelurahan Jakasampurna	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Wilayah Tertib K3	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	-	-	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi	Jumlah Laporan Kegiatan penertiban dan keamanan di Kecamatan Bekasi Barat	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	

KODE KEGIATAN	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D 2023		CATATAN PENTING
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)	
	vertikal di wilayah kecamatan										
		Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	-	-	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan forum koordinasi pimpinan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat

Kecamatan Bekasi Barat sedang menyusun SPM (Standar Pelayanan Minimal), dan upaya peningkatan kinerja pelayanan di lingkungan Kecamatan Bekasi Barat dilakukan secara terukur, yang berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Daerah dan kemudian ditetapkan guna mencapai masing-masing sasaran strategis. Terdapat 4 (empat) indikator Tujuan dan Capaian Nilai Zona Integritas Utama yang telah memiliki formula penghitungannya masing-masing. Rumusan penghitungan/formulasi tersebut disesuaikan dengan tugas, fungsi dari Kecamatan Bekasi Barat sehingga tiap-tiap indikator tersebut memiliki penanggung jawab dari masing-masing seksi yang berbasis data.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bekasi berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Bekasi serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Kecamatan Bekasi Barat tahun 2024 digunakan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) yang diperoleh dari analisis kinerja Kecamatan Bekasi Barat tahun 2024. Pada tahun 2024, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi memiliki dua sasaran yang harus diwujudkan yaitu:

- (1) Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat;
- (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat,

Dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang menjadi IKU. Berikut capaian kinerja kedua sasaran serta IKU tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunan					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	Nilai	40	40	42	42	42	40	40				Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai komponen capaian kinerja
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai	82	82	82.50	82.50	83	82.19	82,45				IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Bekasi Barat adalah masyarakat yang menerima layanan.

		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat	Persen	60	60	60	60	60	60	60				Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang Capaiannya Meningkat/ Jumlah Pemberdayaan Masyarakat diampu Kecamatan) x 100 %
2	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persen (%)	57	57	70	80	86	57	57				(Jumlah zonasi yang telah dितertibkan / Jumlah zona tertib) x 100 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan kerugian besar, isu-isu strategis yang ada pada Kecamatan Bekasi Barat adalah sebagai berikut:

1. Percepatan proses pelayanan publik;
2. Pemeliharaan kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan Bekasi Barat;
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Keempat hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Percepatan Proses Pelayanan Publik merupakan salah satu kebijakan umum Kecamatan Bekasi Barat dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
2. Pemeliharaan kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan Bekasi Barat, belum optimalnya kepedulian warga masyarakat akan kebersihan lingkungannya dan belum optimalnya partisipasi kalangan dunia usaha *Cooperate Social Responsibility* (CSR) di wilayah Kecamatan dalam penataan lingkungan seperti penataan taman atau kegiatan K3 disekitar lingkungan usahanya. Untuk itu Kecamatan Bekasi Barat senantiasa melibatkan warga masyarakat

dalam melalui kegiatan K3, Sosialisasi peningkatan kualitas lingkungan dan memanfaatkan adanya CSR dalam upaya peningkatan penataan lingkungan di wilayah Kecamatan Bekasi Barat.

3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya Pedagang-pedagang kaki Lima (PKL) yang berdagang tidak pada tempatnya, Kecamatan Bekasi Barat senantiasa melakukan penertiban terhadap PKL tersebut.
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, program-program dan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi merupakan hal penting yang disosialisasikan kepada masyarakat Kota Bekasi khususnya Kecamatan Bekasi Barat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi untuk 3 (tiga) tahun ke depan tentunya bukan tidak ada permasalahan. Namun permasalahan tersebut akan dijadikan sebuah tantangan yang akan dapat menjadi peluang untuk peningkatan kinerja yang lebih baik lagi untuk tahun berikutnya. Kecamatan Bekasi Barat sejalan dengan kedudukannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai beberapa potensi/tantangan yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan baik internal maupun eksternal, antara lain :

- 1) SDM Aparatur yang tersedia di Kecamatan Bekasi Barat sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat;
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak yang menyebabkan realisasi capaian target PAD menurun baik dalam besaran maupun alokasi waktu.
- 3) Jumlah personil yang ada dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang;
- 4) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;

- 5) Terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengikuti kemajuan dari teknologi.

Dari adanya permasalahan tersebut diatas maka akan berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bekasi Barat, meningkatnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi, Tidak adanya sumberdaya alam sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD, dan Luasnya wilayah sehingga tingkat permasalahan cukup tinggi.

Untuk itu Kecamatan Bekasi Barat membutuhkan adanya peningkatan-peningkatan di beberapa sector termasuk sarana prasarana dan koordinasi dengan stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Barat. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan harus dilaksanakan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.

2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Barat.

Dalam RKPD Tahun 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.3 T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, untuk besaran anggaran yang

diajukan disesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan dan dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Tabel 2.3/ T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal
RKPD Tahun 2024 Kota Bekasi
OPD : Kecamatan Bekasi Barat

KODE (Urusan/Bid.Urusan/Progr m/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BEKASI							
						PROGRAM/ KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	LOKASI DETAIL		INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT		PAGU (Rp)	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
							Kelurahan	Kecamatan	INDIKATOR	TARGET			DANA
x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	10.000.000		KECAMATAN BEKASI BARAT
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	11.918.494.000		KECAMATAN BEKASI BARAT
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	220.000.000		KECAMATAN BEKASI BARAT
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	540.000.000		KECAMATAN BEKASI BARAT
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	9.410.870.100		KECAMATAN BEKASI BARAT

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	600.000.000		KECAMATAN BEKASI BARAT
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	300.000.000		KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	10.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2.01	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	10.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Meningkatnya Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	11.918.494.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT

x	xx	01	2. 02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bintara	Bekasi Barat	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Premi BPJS ASN	65 Orang	11.908.494.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2. 02	05		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bintara	Bekasi Barat	1. Jumlah Laporan Keuangan	8 Laporan	10.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2, 05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Meningkatnya Disiplin Pegawai	100&	220.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
						Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	250 Stell	200.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2, 05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2, 06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	540.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2. 06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	50.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT

								Bangunan Kantor yang Disediakan					
x	xx	01	2. 06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	260.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2. 06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2. 06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	50.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2. 06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2. 06	02		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	300.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT

						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan	8 Unit	150,000,000,00	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
						Pengadaan Mebelair			Jumlah Mebelair	100 Unit	150,000,000,00	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	9.410.870.100	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2,08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komu-nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	404.600.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2,08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise-diakan	12 Laporan	9.006.270.100	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bintara	Bekasi Barat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	600.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2,09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Ken-daraan Pero-rangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	150.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT

x	xx	01	2, 09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelaha-ra/Direhabilitasi	6 Unit	200.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
x	xx	01	2, 09			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Ken-daraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Per-izinannya	35 Unit	150.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Bintara	Bekasi Barat	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	275.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
7	01	02	2, 03			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			Terlaksananya Kebersihan dan Kenyamanan di Lingkungan	100%	175.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
7	01	02	2, 03	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Doku-men Koordina-si/Sinergi dengan Perangkat Dae-rah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeli-haraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokume n	50.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sa-rana dan Prasara-na Pelayanan Umum Kelurahan	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Doku-men Koordina-si/Sinergi dengan Perangkat Dae-rah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeli-haraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokume n	25.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat

					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Bintarajaya	Bekasi Barat	Jumlah Doku-men Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	25.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jakasampurna	Bekasi Barat	Jumlah Doku-men Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	25.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kranji	Bekasi Barat	Jumlah Doku-men Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	25.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kotabaru	Bekasi Barat	Jumlah Doku-men Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	25.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat

7	01	02	2,04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Caapaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	100.000.000	APBD	KECAMATAN BEKASI BARAT
7	01	02	2,04	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Dokumen Perijinan dan Non Perijinan yang Dilaksanakan	12 Dokumen	100.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Bintara	Bekasi Barat	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	9.074.837.800		
7	01	03	2,02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100%			
7	01	03	2,01	01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Dokumen Evaluasi dan Perencanaan	1 Dokumen	120.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
7	01	03	2,02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintara	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintarajaya	Bintarajaya	Bekasi Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat

						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakasampurna	Jakasampurna	Bekasi Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kranji	Kranji	Bekasi Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotabaru	Kotabaru	Bekasi Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
7	01	03	2, 02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pok-mas / Ormas	200.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pok-mas / Ormas	1.477.759.200	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bintarajaya	Bekasi Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pok-mas / Ormas	1.212.388.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jakasampurna	Bekasi Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pok-mas / Ormas	1.906.156.200	APBD	Kecamatan Bekasi Barat

						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kranji	Bekasi Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pok-mas / Ormas	1.067.884.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kotabaru	Bekasi Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pok-mas / Ormas	1.690.650.400	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
7	01	03	2, 02	04		Evaluasi Kelurahan	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Kegiatan	50.000.000,00	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
7	01	03	2, 03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Bintara	Bekasi Barat		100	350.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
7	01	03	2, 03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Bintara	Bintara	Bekasi Barat	Tersusunnya laporan bulanan Kegiatan LPM Kelurahan Bintara	12 Dokumen	70.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
						Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Bintarajaya	Bintarajaya	Bekasi Barat	Jumlah laporan kegiatan LPM secara berkala	12 Dokumen	70.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
						Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jakasampurna	Jakasampurna	Bekasi Barat	Jumlah Laporan kegiatan LPM secara berkala	12 Dokumen	70.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
						Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Kranji	Kranji	Bekasi Barat	Tersusunnya Laporan Kegiatan LPM Secara Berkala	12 Dokumen	70.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat

						Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Kotabaru	Kotabaru	Bekasi Barat	Tersusunnya Laporan Kegiatan LPM Secara Berkala	12 Dokumen	70.000.000	APBD	Kecamatan Bekasi Barat
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Bekasi Barat	Persentase Wilayah Tertib K3	100%	1.425.476.000		
7	01	04	2, 01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Bekasi Barat					
7	01	04	2, 01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat	Bekasi Barat	Jumlah Laporan Kegiatan penertiban dan keamanan di Kecamatan Bekasi Barat	12 Laporan	100.000.000	APBD	Kecamatan
						Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		Bekasi Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 Laporan	380.056.000		
						Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Bintara	Bekasi Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 Laporan	214.000.000		
						Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Bintarajaya	Bekasi Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh	12 Laporan	162.280.000		

								agama dan tokoh masyarakat					
						Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kranji	Bekasi Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 Laporan	156.340.000		
						Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kotabaru	Bekasi Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 Laporan	192.800.000		
						Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jakasampurna	Bekasi Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 Laporan	300.000.000		
	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Bekasi Barat		100%			
						Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai PEnugasan Kepala Daerah		Bekasi Barat		1 Kegiatan	50.000.000	APBD	Kecamatan
						Pelaksanaan Tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Bekasi Barat		12 Laporan	50.000.000	APBD	Kecamatan
TOTAL											33.824.677.900		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah khususnya di wilayah Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yaitu melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan.

Musrenbang kecamatan tidak hanya menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di kelurahan yang diusulkan dari musrenbang kelurahan, tetapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Selain itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi masyarakat agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Daftar lengkap usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di lingkungan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi tidak ada yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Bekasi Barat

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikator	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Nihil				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BEKASI BARAT

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah di rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, periode pembangunan 2020- 2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025.

Arah Kebijakan Umum Nasional bagi Kecamatan yaitu merupakan keselarasan antara kebijakan Umum Nasional dengan Kebijakan Umum Pemerintah Kota Bekasi, antara lain:

1. Urusan Otonomi Daerah & Pemerintahan Umum
 - a. Menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Kecamatan Bekasi Barat dengan memegang teguh 10 Prinsip Good Governance secara Konsisten;
 - b. Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Publik
2. Pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
 - b. Meningkatkan Keswadayaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan;
 - c. Mendorong partisipasi kelembagaan dan keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian;
 - d. Mendorong partisipasi kelembagaan dan keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Renja Kemendagri memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renja kementrian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Barat dengan ditanda tangannya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan

persatuan bangsa.

2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi Barat tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bekasi Barat disediakan ruang bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dalam rangka merealisasikan permasalahan pokok dan isu strategis. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Kecamatan Bantargebang akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Bantargebang, maka ditetapkanlah Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bantargebang. Tujuan kesatu yaitu “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel di Kecamatan Bantargebang” mengakomodir isu Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan Tujuan kedua yaitu “Mewujudkan Kecamatan Bantargebang yang Aman dan Nyaman” mengakomodir isu Peningkatan Ketertiban, Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan”

Penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024 ini mengacu kepada program prioritas pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Terpilih periode tahun 2024-2026. Untuk mewujudkan, dilaksanakan langkah yang terdiri dari :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi. Camat bantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan. Serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan dan kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Seksi Kesejahteraan Sosial menanganimempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Seksi Ekonomi Pembangunan menanganimempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Keamanan Ketertiban menanganimempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
- b. Penetapan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi kecamatan;
- c. Penetapan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
- d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama di lingkungan Kecamatan;
- h. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan perekonomian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup serta sosial budaya di lingkungan kecamatan;
- i. Penyelenggaraan perizinan tertentu yang dilimpahkan oleh Walikota;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah dan lembaga / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
- k. Pembinaan dan Pengendalian tugas yang dilaksanakan Lurah;
- l. Pembinaan dan pengendalian, administrasi keuangan kepegawaian dan urusan rumah tangga kecamatan;
- m. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
- n. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas UPTD, UPTB di wilayah kerjanya;
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan kelurahan;
- p. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- q. Pembinaan administrasi perkantoran serta tatalaksana pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- r. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup kecamatan dan kelurahan;
- s. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
- t. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
- u. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. Pemberian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kecamatan kepada Walikota Bekasi melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- w. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Wali Kota.

3.2.1 Tujuan

Kecamatan Bekasi Barat memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Aparatur Kecamatan Bekasi Barat dalam Pengelolaan dan Layanan Pemerintahan
Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat dalam EKPPD Kota Bekasi.
2. Mewujudkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Barat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat
Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, Tingkat Penanganan terhadap masalah Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat

3.2.1 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Bekasi Barat menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat
Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Nilai Akip Kecamatan Bekasi Barat, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat , Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik.

2. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Bekasi Barat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat
- Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Barat.

3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Barat

Program adalah rencana yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Program ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Kegiatan merupakan pelaksanaan/pekerjaan yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan katalain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya,jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 Berdasarkan
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

NO	BLPU/BLU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU 2024	KET
1	BLU	4	6	28	10.854.981.400	
2.	BLPU	1	6	19	22.473.665.100	
TOTAL		5	12	47	34.088.379.500	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan program/kegiatan kewilayahan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat 5 Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Barat terdiri dari 4 Program Belanja Langsung Urusan (BLU) dan 1 Program Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU). Program yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Barat mendukung Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2024-2026.

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN
RANCANGAN AWAL RPJMD KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023

KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BEKASI							
						PROGRAM/ KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (SUB KEGIATAN)	LOKASI DETAIL		INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT		PAGU (Rp)	SUMBER DANA	PENANGG UNG JAWAB
							Kelurahan	Kecamatan	INDIKATOR	TARGET			OPD
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Kecamatan Bekasi Barat					
7	01				KECAMATAN			Kecamatan Bekasi Barat			23.233.398.100		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Kecamatan Bekasi Barat			150.000.000		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			Kecamatan Bekasi Barat			50.000.000		
7	01	02	2.03	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan UmumSarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	50.000.000	PAD	

7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Kecamatan Bekasi Barat			100.000.000	PAD	
7	01	02	2.04	01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	100.000.000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Kecamatan Bekasi Barat			280.000.000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Kecamatan Bekasi Barat			280.000.000	PAD	
7	01	03	2.02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kecamatan Bekasi Barat			120.000.000		
									Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakan			
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kecamatan Bekasi Barat			110.000.000	PAD	
								Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas			

7	01	03	2.02	04		Evaluasi Kelurahan		Kecamatan Bekasi Barat			50.000.000	PAD	
								Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan			
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kecamatan Bekasi Barat			289.733.000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Bekasi Barat			289.733.000		
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.000.000	PAD	
7	01	04	2.01	02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	239.733.000	PAD	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Kecamatan Bekasi Barat			40.000.000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Kecamatan Bekasi Barat			40.000.000		

7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	40.000.000	PAD	
7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI			Kecamatan Bekasi Barat					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kecamatan Bekasi Barat			22.473.665.100		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Bekasi Barat			3.000.000		
7	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.000.000	PAD	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kecamatan Bekasi Barat			11.979.795.000		
								Kecamatan Bekasi Barat					

7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	732 Orang/bulan	11.976.795.000	PAD	
7	01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 LAPORAN	3.000.000	PAD	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kecamatan Bekasi Barat			10.000.000		
7	01	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		PAD	
7	01	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	10.000.000	PAD	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kecamatan Bekasi Barat			350.000.000		
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	PAD	
7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	240.000.000	PAD	
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.00	PAD	

7	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20.000.000	PAD	
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.000.000	PAD	
7	01	01	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	PAD	
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kecamatan Bekasi Barat			160.000.000	PAD	
7	01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	PAD	
7	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		160.000.000	PAD	
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Bekasi Barat			9.410.870.100	PAD	
7	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	404.600.000	PAD	
7	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.006.270.100	PAD	

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kecamatan Bekasi Barat			560.000.000	PAD	
7	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50.000.000	PAD	
7	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	150.000.000	PAD	
7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	110.000.000	PAD	
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	250.000.000	PAD	
7					UNSUR KEWILAYAHAN		Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat					
7	01				KECAMATAN		Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat			1.918.932.800		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat			20.000.000		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat			20.000.000		

7	01	02	2.03	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat			1.694.932.800		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat			1.654.932.800		
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000		
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.454.932.800	PAD	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat			40.000.000		
7	01	03	2.03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasya katan	40.000.000		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat			204.000.000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat			204.000.000		

7	01	04	2.01	02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Bintara	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	204.000.000		
7					UNSUR KEWILAYAHAN		Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat					
7	01				KECAMATAN		Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat			2.004.388.000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat			20.000.000		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat			20.000.000		
7	01	02	2.03	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat			1.834.388.000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat			1.794.388.000		
7	01	03	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000		

7	01	03	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.594.388.000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat			40.000.000		
7	01	03	2.03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasya katan	40.000.000		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat			150.000.000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat			150.000.000		
7	01	04	2.01	02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Bintarajaya	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		150.000.000		
7					UNSUR KEWILAYAHAN		Kel. Kranji	Kec. Bekasi Barat					
7	01				KECAMATAN		Kel. Kranji	Kec. Bekasi Barat			1.839.184.000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kel. Kranji	Kec. Bekasi Barat			20.000.000		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Kel. Kranji	Kec. Bekasi Barat			20.000.000		
7	01	02	2.03	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah	Kel. Kranji	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan	12 Dokumen	20.000.000		

						dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kel. Kranji	Kec. Bekasi Barat			1.675.184.000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kel. Kranji	Kec. Bekasi Barat			1.635.184.000		
7	01	03	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Kranji	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000		
7	01	03	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Kranji	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.435.184.000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kel. Kranji	Kec. Bekasi Barat			40.000.000		
7	01	03	2.03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Kranji	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasya katan	40.000.000		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kel. Kranji	Kec. Bekasi Barat			144.000.000		
7	01	04	2.01	02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Kranji	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	144.000.000		
7					UNSUR KEWILAYAHAN		Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat					

7	01				KECAMATAN		Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat			2.527.686.400		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat			20.000.000		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat			20.000.000		
7	01	02	2.03	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat			2.327.686.400		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat			2.287.686.400		
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000		
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2.087.686.400		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat			40.000.000	PAD	

7	01	03	2.03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasya- katan	40.000.000		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat			180.000.000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat			180.000.000		
7	01	04	2.01	02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Kotabaru	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 LAporan	180.000.000		
7					UNSUR KEWILAYAHAN		Kel. Jakasampurna	Kec. Bekasi Barat					
7	01				KECAMATAN		Kel. Jakasampurna	Kec. Bekasi Barat			2.564.790.200		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kel. Jakasampurna	Kec. Bekasi Barat			20.000.000		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Kel. Jakasampurna	Kec. Bekasi Barat			20.000.000		
7	01	02	2.03	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Kel. Jakasampurna	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	12 Dokumen	20.000.000		

						Prasarana Pelayanan Umum			dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kel. Jakasampurna	Kec. Bekasi Barat			2.250.790.200		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kel. Jakasampurna	Kec. Bekasi Barat			2.210.790.200		
7	01	03	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Jakasampurna	Kec. Bekasi Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000		
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2.010.790.200		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						40.000.000		
7	01	03	2.03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	PAD	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						294.000.000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						294.000.000		
7	01	04	2.01	02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	294.000.000		

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya rencana kerja Kecamatan Bekasi Barat. Ada beberapa catatan penting yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Renovasi Ruang Pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti harus diadakannya Bimbingan Teknis kepada petugas pelayanan, merenovasi ruang pelayanan agar menjadi lebih nyaman dan Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan yang sekarang akan berjalan menggunakan OSS (*Online System Submission*).

Beberapa hal penting yang perlu untuk mendapat perhatian dalam rencana kerja ini adalah bahwa Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka pendek/dokumen operasionalisasi dari Rencana Strategis yang berdurasi tiga tahun. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 sudah sesuai berdasarkan dengan rancangan awal RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Barat dalam proses penyusunannya mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas output perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah dengan tolak ukur kinerja adalah capaian RPJMD Kota Bekasi 2024-2026. Proses penyusunan Rencana Kerja ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Rencana Kerja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

5. 1 Kaidah Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Rencana Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat dengan Sekretaris Kecamatan Bekasi Barat;
2. Seluruh komponen seksi dan sub bagian pada Kecamatan Bekasi Barat agar melaksanakan program-program dalam Rencana kerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
3. Program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya namun juga harus memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Agar Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Kecamatan Bekasi Barat diharapkan mengupayakan penguatan peran *stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing seksi/bagian;
 - b. Camat Bekasi Barat menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala seksi melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja seksi periode sebelumnya;
 - d. Camat Bekasi Barat menyusun evaluasi rencana kerja berdasarkan hasil evaluasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (c);

- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja Camat Bekasi Barat dihadapkan pada hal-hal di luar kendali, maka Konsepsi Strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bekasi Barat. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan draft Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu lakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian rumusan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Bekasi Barat.

Bekasi,

CAMAT BEKASI BARAT



GUTUS HERMAWAN EP, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 197108171998031010